

**ANALISIS PERENCANAAN PROGRAM CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V DI PEKANBARU
(Studi tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN V)**

WELLY WIRMAN

Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Riau
welly.wirman@yahoo.com

ABSTRAK

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, PT. Perkebunan Nusantara V mengimplementasikan program CSRnya melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program ini berbentuk pemberian pinjaman modal kerja kepada sector usaha kecil, mikro dan koperasi dengan imbal jasa (bunga) yang terjangkau. Didalam pelaksanaannya masih banyak keluhan atau penilaian masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dimana pelaksanaan program kadang kala terkesan hanya sekedar menyelesaikan atau mengejar terlaksananya apa yang sudah direncanakan baik fisik maupun non fisik tanpa memperhatikan dampak atau tindak lanjut dari program tersebut. Hal ini akan semakin sering kita dengar ketika pola pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat meninggalkan prinsip partisipatif (partisipatori) dalam tahapan aktivitas program. Dalam hal ini komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung program pembangunan masyarakat. Banyak program di bidang pembangunan masyarakat sekitar mengalami kegagalan karena tidak disertai perencanaan komunikasi yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tahap-tahap perencanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dilaksanakan oleh PT Perkebunan Nusantara V.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Perkebunan Nusantara V yang berlokasi di Pekanbaru Riau, telah melakukan atau melaksanakan perencanaan program PKBL dengan cukup baik, namun demikian masih ada tahapan-tahapan perencanaan program yang perlu dilengkapi atau disempurnakan guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal. PT Perkebunan Nusantara V belum melaksanakan perencanaan komunikasi secara khusus karena hasil lapangan belum menunjukkan secara jelas adanya perencanaan terkait sumberdaya komunikasi seperti perencanaan terhadap sumber, pesan, media dan khalayak serta efeknya.

Keywords: *Perencanaan komunikasi, Program CSR PTPN V, PKBL*

PENDAHULUAN

Eksistensi suatu perusahaan atau dunia usaha dewasa ini telah menjelma menjadi institusi yang dominan di masyarakat dan harus mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama. Setiap keputusan yang dibuat, setiap tindakan yang diambil haruslah dilihat dalam kerangka tanggung jawab. Salah satu isu penting yang terus menjadi perhatian dunia usaha saat ini adalah soal

tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan juga aspek sosial dan lingkungan yang biasa disebut *triple bottom line*. Sinergis dari tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Program CSR (*Coorporate Social Responsibility*) merupakan salah satu program yang diluncurkan oleh pihak perusahaan terhadap masyarakat yang ada di sekitar operasional perusahaan tersebut. Hal ini bertujuan agar terjalinnya hubungan yang harmonis antara pihak perusahaan dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dimana program ini diwajibkan untuk semua perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), saat ini menjadi salah satu isu penting yang terus menjadi perhatian dunia usaha.

Salah satu ide pokok *Corporate Social Responsibility* (CSR) terkait dengan mandat dunia usaha adalah dunia usaha tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi harus pula bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi sosial. Diantaranya, yang lazim dilakukan oleh perusahaan adalah menyelenggarakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Sebuah program pemberdayaan masyarakat, tidak lain merupakan integrasi dari berbagai penggal aktivitas (subsistem) yang dimulai dari proses perencanaan program hingga monitoring dan evaluasi, sampai kepada tindak lanjut dari program tersebut (*follow up*). Setiap penggal aktivitas dari program pemberdayaan masyarakat mempunyai makna strategis terhadap keberhasilan dari program tersebut. Komunikasi adalah salah satu faktor penting dalam mendukung program pembangunan masyarakat, kegagalan proses pada tahapan aktivitas program akan meruntuhkan suksesnya program tersebut. Oleh sebab itu diperlukan perencanaan komunikasi yang baik untuk mengimplementasikan program-program yang ingin dicapai. Banyak program di bidang pembangunan masyarakat sekitar mengalami kegagalan karena tidak disertai perencanaan komunikasi yang baik, hal ini menunjukkan bahwa tidak jarang pelaksanaan program hanya sekedar menyelesaikan atau mengejar terlaksananya apa yang sudah direncanakan baik fisik maupun non fisik tanpa memperhatikan dampak dan tindak lanjut dari program tersebut.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V) mengimplementasikan program CSRnya melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program ini berbentuk pemberian pinjaman modal kerja kepada sektor usaha kecil, mikro dan koperasi, dengan imbal jasa (bunga) yang terjangkau. PTPN V turut membantu pemerintah dalam kemudahan menyediakan pinjaman modal kerja melalui program kemitraan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN NO: SE-04/MBU.5/2012 PTPN V ditunjuk sebagai koordinator penyaluran PKBL BUMN di Provinsi Riau.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi social masyarakat. oleh PTPN V diwujudkan dalam bentuk pemberian pinjaman untuk membiayai modal usaha kecil yang berada di Riau. Sasaran program kemitraan yaitu masyarakat disekitar wilayah kerja perseroan berupa pinjaman modal kerja untuk sektor perdagangan, industry, jasa, peternakan, pertanian, perikanan, dan perkebunan, serta berupa hibah (pelatihan/penyuluhan, studi banding, pameran, pendampingan dan benchmarking)

Dalam pelaksanaannya masih banyak keluhan atau penilaian masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dimana pelaksanaan program kadang kala terkesan hanya sekedar menyelesaikan atau mengejar terlaksananya apa yang sudah direncanakan, baik fisik maupun non fisik tanpa memperhatikan dampak atau tindak lanjut dari program tersebut. Hal ini akan semakin sering kita dengar ketika pola pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat meninggalkan prinsip partisipatif (partisipatori) dalam tahapan aktivitas program. Kegagalan proses pada tahapan aktivitas program akan meruntuhkan suksesnya program tersebut. Dalam hal ini komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung program pembangunan masyarakat. Banyak program di bidang pembangunan masyarakat sekitar mengalami kegagalan karena tidak disertai perencanaan komunikasi yang baik.

Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengevaluasian suatu program kerja bukanlah pekerjaan yang mudah atau hanya merupakan kerja sambilan, tetapi harus dikelola secara profesional dan serius serta penuh konsentrasi. Terkait dengan hal tersebut maka dibutuhkan sebuah perencanaan komunikasi yang baik agar dapat mencapai tujuan atau sasaran sebagaimana yang telah direncanakan. Sejalan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tahapan-tahapan perencanaan program CSR PTPN V yang diimplementasikan dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan?

Perencanaan Komunikasi

Perencanaan komunikasi merupakan proses pengalokasian sumberdaya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumberdaya tersebut tidak saja mencakup media massa dan komunikasi antarpribadi, tapi juga setiap aktifitas yang dirancang untuk mengubah perilaku dan menciptakan keterampilan-keterampilan tertentu diantara individu dan kelompok dalam lingkup tugas-tugas yang dibebankan oleh organisasi (John Middleton dalam Cangara, 2014). Perencanaan komunikasi adalah suatu usaha yang sistematis dan kontinu dalam mengorganisir aktivitas manusia terhadap upaya penggunaan sumber daya komunikasi secara efisien guna merealisasikan kebijaksanaan komunikasi (AMIC, 1982). Perencanaan komunikasi dalam kerangka yang sangat sederhana selalu dikaitkan dengan bagaimana menciptakan komunikasi yang efektif, dalam kerangka yang lebih luas perencanaan komunikasi sangat diperlukan untuk menyusun strategi agar program yang disusun bisa berhasil.

Untuk mendapatkan suatu perencanaan yang baik dan ideal diperlukan prinsip-prinsip yang mendasari rencana tersebut diantaranya prinsip partisipatif dan berkesinambungan. Prinsip partisipatif dimaksudkan bahwa sebuah rencana yang ideal harus dapat mendorong terciptanya partisipatif, baik dari pengelola maupun para stakeholder yang menjadi target sasaran perencanaan itu. Partisipasi dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk, antara lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Sedangkan prinsip berkesinambungan dimaksudkan bahwa perencanaan dibuat tidak hanya untuk sesaat, melainkan harus mempertimbangkan proses kelanjutannya secara berkesinambungan. Artinya pada saat membuat perencanaan harus memperhitungkan bahwa rencana yang disusun memiliki kelanjutan setelah dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu. Perencanaan yang baik tidak hanya berhenti pada satu tahap, melainkan

terus berlanjut.(Cangara, 2014). Dari beberapa definisi atau pengertian perencanaan komunikasi diatas, dapat ditarik beberapa pokok pikiran yang ada di dalamnya yaitu :

- a. Merupakan aktivitas manusia yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan dari satu proses ke proses selanjutnya.
- b. Memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu.
- c. Untuk mencapai tujuan itu perencanaan komunikasi menetapkan alokasi sumber daya (dana, barang/alat, manusi atau keahlian, dan program)
- d. Perencanaan komunikasi menggunakan unsur-unsur komunikasi yang mencakup sumber, pesan, media, target sasaran dan efek (perubahan) sebagai komponen audit.
- e. Perencanaan komunikasi memerlukan pengukuran hasil dan evaluasi.

Menyusun Perencanaan yang Ideal

Untuk mendapatkan suatu perencanaan yang baik dan ideal, maka diperlukan lima prinsip yang mendasari rencana tersebut, yaitu :

- a. Prinsip partisipatif
- b. Prinsip Kesenambungan
- c. Prinsip Holistic
- d. Mengandung sistem yang dapat berkembang
- e. Terbuka dan demokratis.

Prinsip partisipatif dimaksudkan bahwa sebuah rencana yang ideal harus dapat mendorong terciptanya partisipatif, baik dari pengelola maupun para stakeholder yang menjadi target sasaran perencanaan itu. partisipatif disini bukan saja diartikan kesediaan pihak-pihak tertentu untuk menunjukkan kerelaan mendukung dan menjalankan program, tetapi lebih jauh seperti dinyatakan oleh Cohen Uphoff (1985) bahwa partisipasi dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk, antara lain dalam perencanaan pelaksanaan, pengawasan, dan kebersamaan menikmati hasil dari aktivitas yang telah dilakukan.

Prinsip berkesinambungan dimaksudkan bahwa perencanaan dibuat tidak hanya untuk sesaat, melainkan harus mempertimbangkan proses kelanjutannya secara berkesinambungan. Artinya pada saat membuat perencanaan harus memperhitungkan bahwa rencana yang disusun memiliki kelanjutan setelah dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu. Perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap tetapi harus berlanjut. Suatu pengalaman tsering terjadi jika suatu organisasi, khususnya dilembaga pemerintahan atau perusahaan yang memiliki banyak subordinas mengalami pergantian pimpinan, maka kebijakan dan perencanaan yang dibuatnya juga berubah, sehingga staf sering kali kebingungan karena berlaku istilah”*lain pimpinan lain kebijakan, dan lain perencanaan*”.

Perencanaan harus melihat jangkauan yang jauh kedepan, dengan demikian program-program yang akan dilakukan senantiasa berada dalam tataran perencanaan strategic yang telah dibuat. Dan jika terjadi penggantian pimpinan maka yang berubah adalah style atau gaya kepemimpinan, dan bukan perencanaan, sebab perencanaan mengacu pada perencanaan induk atau perencanaan strategik yang telah ada ditingkat pusat (*central office*).

Prinsip holistic, artinya menyeluruh dan tidak disusun berdasarkan unit-unit melainkan secara keseluruhan mengikat semua unit-unit dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan. Perencanaan tidak hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Dengan demikian, perencanaan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan diikat oleh suatu cita-cita yang dibangun oleh semua pihak dalam organisasi dan hasilnya akan kembali pada organisasi itu sendiri. Perencanaan yang menganut prinsip holistik sering kali ditemui dalam perencanaan yang berskala nasional atau kawasan, tapi pada skala yang lebih kecil juga bisa diimplementasikan dengan cara mencakup semua unit yang ada didalamnya.

Prinsip *learning and adaptive system*, dimaksudkan bahwa sebuah perencanaan harus dilihat sebagai suatu sistem dimana semua komponen yang membangun organisasi itu berkaitan satu sama lain, termasuk unsur perencanaan itu sendiri. Perencanaan harus bisa bersinergi dan menyesuaikan diri dengan unsur-unsur lain dalam manajemen, misalnya tipe organisasi yang ada, apakah pemerintah, perusahaan swasta atau organisasi sosial, berorientasi pada profit atau nirlaba, sumber daya yang ada, serta misi, visi, dan tujuan yang ingin dicapai organisasi tersebut. Dengan cara demikian maka prinsip learning untuk saling mengisi dan bersinergi antara semua komponen di dalamnya tetap terpelihara.

Prinsip terbuka dan demokratis (a plural and social setting) dimaksudkan bahwa perencanaan yang disusun sebagai hasil pemikiran dari banyak pihak, karena itu prinsip keterbukaan harus selalu dikedepankan. Sebuah perencanaan yang disusun dengan memperhitungkan prinsip keterbukaan dan demokratis diharapkan dapat memperoleh dukungan dari pihak-pihak yang menyusun rencana tersebut maupun yang akan menjadi target sasaran. Sebab para perencana dan target sasaran menjadi asset organisasi atau perusahaan yang akan menentukan keberlanjutan organisasi itu.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PTPN V

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau dikenal dengan PKBL adalah bentuk tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada masyarakat. PKBL memiliki 2 (dua) program, pertama adalah Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Kedua adalah Program Bina Lingkungan yaitu program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan.

Semenjak berdiri pada tahun 1996, PTPN V telah menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-97/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Walaupun terjadi perubahan status (Persero) PTPN V,

sebagaimana amanah pemegang saham melalui rapat RUPS, Perseroan tetap melaksanakan program PKBL hingga sekarang ini.

Sasaran Program Kemitraan adalah untuk peningkatan kemajuan teknis dan manajerial usaha kecil dan menengah di sekitar wilayah kebun / unit kerja agar menjadi wira usaha yang berintegritas, tangguh, profesional dan mandiri melalui sistem dana bergulir / bergilir dan hibah yang berasal dari penyisihan laba. Sasaran Program Bina Lingkungan adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan kondisi dan kualitas sosial / ekonomi masyarakat

Dalam Program Kemitraan kegiatan yang dilaksanakan PTPN V aktif dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sekitar wilayah kebun/unit kerja dengan sistem dana bergulir dan hibah yang langsung mendukung kegiatan Program Kemitraan. Jumlah Mitra Binaan Tahun 2015 adalah 263 Mitra sedangkan Jumlah Mitra Binaan Program Kemitraan PT Perkebunan Nusantara V sampai dengan Tahun 2015 adalah sejumlah 3.983 Mitra dengan rincian sebagai berikut sesuai dengan wilayah kerja dan sektor penyaluran dana (Anual Report PTPN V 2015).

Wilayah Kerja Program Kemitraan s/d Tahun 2015 :

1. Kota Pekanbaru	: 986 Mitra
2. Kabupaten Kampar	: 769 Mitra
3. Kabupaten Rokan Hulu	: 660 Mitra
4. Kabupaten Rokan Hilir	: 287 Mitra
5. Kabupaten Siak	: 584 Mitra
6. Kabupaten Indragiri Hulu	: 495 Mitra
7. Kabupaten Indragiri Hilir	: 49 Mitra
8. Kabupaten Kuantan Singingi	: 78 Mitra
9. Kabupaten Bengkalis	: 75 Mitra

Sektor Penyaluran Dana Program Kemitraan s/d Tahun 2015 :

1. Industri	: 233 Mitra
2. Perdagangan	: 1.720 Mitra
3. Pertanian	: 426 Mitra
4. Peternakan	: 360 Mitra
5. Perkebunan	: 342 Mitra
6. Perikanan	: 230 Mitra
7. Jasa	: 672 Mitra

PT Perkebunan Nusantara V aktif melaksanakan program Bina Lingkungan yang merupakan upaya pembinaan dengan menyalurkan bantuan dana hibah kepada masyarakat sekitar kebun/unit usaha. Melalui program ini diharapkan terjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar unit kerja perusahaan sehingga Perusahaan dapat mengoperasikan bisnisnya secara berkelanjutan, sedangkan kualitas sosial dan lingkungan masyarakat semakin meningkat.

Sepanjang Tahun 2015, bentuk kegiatan yang didanai oleh Program Bina Lingkungan meliputi, antara lain : a). Pendidikan, PT Perkebunan Nusantara V memberikan beasiswa kepada 30 (tiga puluh) orang mahasiswa dari keluarga kurang mampu. b). Kerohanian (Sarana Ibadah), berupa bantuan untuk pembangunan dan perbaikan rumah ibadah (mesjid, mushalla dan gereja) yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Riau yang bersempadan dengan wilayah kebun/unit kerja Perusahaan. c). Sarana & Prasarana Umum, diantaranya dipergunakan untuk pembangunan/perbaikan : gedung sekolah, pos yandu, pagar sekolah dan sebagainya. d). Pengentasan Kemiskinan Bantuan yang diberikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu di sekitar wilayah kerja Perusahaan.

Pengaruh Program PKBL terhadap masyarakat sekitar : - Meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Perusahaan dengan memberikan pinjaman modal usaha dari Program Kemitraan. - Program Bina Lingkungan secara tidak langsung dapat menetralsisir gejolak sosial yang timbul di sekitar wilayah kerja Perusahaan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Subjek penelitian berjumlah 17 orang yang dipilih secara purposive, terdiri dari Kepala Bagian Humas, Kepala Urusan PKBL, beserta 3 orang karyawan pelaksana PKBL PTPN V dan 12 orang masyarakat penerima bantuan dana PKBL di 6 wilayah operasional perusahaan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data interaktif Miles dan Huberman. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V) mengimplementasikan program CSRnya melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program ini berbentuk pemberian pinjaman modal kerja kepada sektor usaha kecil, mikro dan koperasi dengan imbal jasa (bunga) yang terjangkau. PTPN V turut membantu pemerintah dalam kemudahan menyediakan pinjaman modal kerja melalui program kemitraan. Peningkatan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri oleh PTPN V diwujudkan dalam bentuk pemberian pinjaman untuk membiayai modal usaha kecil yang berada di Riau. Sasaran program kemitraan yaitu masyarakat disekitar wilayah kerja perseroan berupa pinjaman modal kerja untuk sektor perdagangan, industry, jasa, peternakan, pertanian, perikanan, dan perkebunan, serta berupa hibah (pelatihan/penyuluhan, studi banding, pameran, pendampingan dan benchmarking)

Dalam pelaksanaannya masih banyak keluhan atau penilaian masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dimana pelaksanaan program kadang kala terkesan hanya sekedar menyelesaikan atau mengejar terlaksananya apa yang sudah direncanakan, baik fisik maupun non fisik tanpa memperhatikan dampak atau tindak lanjut dari program tersebut. Hal ini

akan semakin sering kita dengar ketika pola pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat meninggalkan prinsip partisipatif (partisipatori) dalam tahapan aktivitas program. Kegagalan proses pada tahapan aktivitas program akan meruntuhkan suksesnya program tersebut. Dalam hal ini komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung program pembangunan masyarakat. Banyak program di bidang pembangunan masyarakat sekitar mengalami kegagalan karena tidak disertai perencanaan komunikasi yang baik.

Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengevaluasian suatu program kerja bukanlah pekerjaan yang mudah atau hanya merupakan kerja sambilan, tetapi harus dikelola secara profesional dan serius serta penuh konsentrasi. Terkait dengan hal tersebut maka dibutuhkan sebuah perencanaan komunikasi yang baik agar dapat mencapai tujuan atau sasaran sebagaimana yang telah direncanakan.

Perencanaan komunikasi merupakan proses pengalokasian sumberdaya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumberdaya tersebut tidak saja mencakup media massa dan komunikasi antarpribadi, tapi juga setiap aktifitas yang dirancang untuk mengubah perilaku dan menciptakan keterampilan-keterampilan tertentu diantara individu dan kelompok dalam lingkup tugas-tugas yang dibebankan oleh organisasi (John Middleton dalam Cangara, 2014).

Perencanaan komunikasi adalah suatu usaha yang sistematis dan kontinu dalam mengorganisir aktivitas manusia terhadap upaya penggunaan sumber daya komunikasi secara efisien guna merealisasikan kebijaksanaan komunikasi (AMIC, 1982). Perencanaan komunikasi dalam kerangka yang sangat sederhana selalu dikaitkan dengan bagaimana menciptakan komunikasi yang efektif, dalam kerangka yang lebih luas perencanaan komunikasi sangat diperlukan untuk menyusun strategi agar program yang disusun bisa berhasil.

Tahapan perencanaan komunikasi pada dasarnya terdiri dari : (1) tahap identifikasi masalah komunikasi, (2) tahap perumusan tujuan komunikasi, (3) tahap penetapan rencana strategik, (4) tahap penetapan rencana operasional, (5) tahap penyusunan rencana evaluasi, dan (6) tahap merencanakan rekomendasi. Tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan satu persatu secara berurutan, tidak boleh meloncat-loncat.

Dalam tahap identifikasi masalah perlu dilakukan pengumpulan data/fakta/informasi mengenai kondisi khalayak sebagai bahan untuk melakukan analisis khalayak. Perumusan masalah harus berdasarkan pada *felt needs* dan *real needs* yang dimiliki oleh khalayak sasaran.

Perencanaan PKBL dilaksanakan pada setiap tahun anggaran, dimana pada tahap ini dibahas rencana kerja dan anggaran untuk setiap tahunnya. Jumlah pihak yang terlibat dalam perencanaan tersebut sebanyak tujuh orang yang melibatkan pihak Direksi, Kepala Bagian, Kepala urusan dan Asisten Urusan. Perencanaan dilaksanakan melalui rapat internal, pada rapat internal tersebut dibahas juga respon masyarakat penerima tahun lalu, dampak program pada masyarakat penerima, dan kendala-kendala yang dihadapi pada tahap pelaksanaan. Pada proses perencanaan masyarakat tidak dilibatkan dan penggunaan media juga terbatas. Dalam pembuatan perencanaan hendaknya dapat diikuti berbagai pihak untuk memperoleh masukan (input) agar lebih sempurna. Dengan adanya partisipasi, perusahaan akan memperoleh manfaat ganda, karena disamping rencana menjadi lebih baik, juga dapat menambah semangat kerja para karyawan.

Selain itu dalam proses identifikasi masih harus bersifat menunggu. Hal ini dikarenakan PKBL akan dilaksanakan sesuai dengan proposal yang masuk ke PTPN V yang sebelumnya telah mendapat rekomendasi dari pihak Dinas Koperasi. Pihak-pihak UMKM yang ingin mendapatkan bantuan dana PKBL sebelumnya harus memasukkan proposal terlebih dahulu kepada Dinas koperasi. Dinas Koperasi menjadi instansi terkait yang akan menyeleksi apakah UMKM tersebut layak untuk direkomendasikan agar mendapat bantuan dana PKBL dari PTPN V. Dari hasil di lapangan, peneliti juga mendapatkan hasil bahwa setiap proposal yang direkomendasikan oleh pihak Dinas Koperasi juga tidak semuanya mendapatkan bantuan. Pihak PTPN V baru akan mensurvei ke lapangan setelah mendapatkan proposal yang telah lulus dan direkomendasikan oleh Dinas Koperasi. Bentuk survei yang dilakukan adalah dengan memperhatikan bentuk usahanya, lokasi usaha, bagaimana usaha tersebut dikelola hingga bagaimana mengelola uang yang akan diberikan. Kemudian calon mitra binaan diminta untuk melengkapi formulir, jaminan yang diberikan serta data-data pendukung.

Data lapangan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan komunikasi pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN V terlihat masih sederhana dan belum mengikuti tahapan-tahapan perencanaan yang jelas. Perencanaan tidak diawali terlebih dahulu dengan penelitian (research) ataupun pengumpulan data *base-line* dan *need assessment* untuk mengetahui kondisi terkini sebelum program dilaksanakan. Padahal disamping sebagai data awal, *baseline survey* akan sangat membantu proses monitoring, proses pelaksanaan dan evaluasi pada akhir program. Sedangkan *need assessment* bertujuan untuk mengumpulkan data guna mengidentifikasi kebutuhan dari kelompok atau individu. *Need assessment* merupakan identifikasi masalah dimasyarakat dengan metode mencari data untuk mendapatkan solusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Intinya adalah tahap perencanaan ini belum terlaksana dikarenakan prosesnya baru dapat direalisasikan apabila sudah mendapatkan proposal yang telah direkomendasi oleh Dinas Koperasi dan layak untuk diberikan dana PKBL.

Disamping itu Bagian PKBL PTPN V juga belum menetapkan pemilihan media sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat di dalam merancang programnya. Hal ini menyebabkan belum meratanya penerimaan informasi dikalangan masyarakat. Walaupun memang tanpa media massa pun mitra PKBL PTPN V sudah banyak tersebar di berbagai daerah. Namun, apabila digunakan media tentu hasilnya akan lebih baik lagi dalam membangun kondisi ekonomi masyarakat.

Penetapan rencana strategik memuat unsur-unsur 5 M, yaitu: Man, Messages, Media, Money, dan Means. Kelima komponen penetapan rencana strategi ini harus ada agar strategi yang digencarkan dalam melaksanakan suatu program dapat tercapai. Data penelitian menunjukkan pihak PTPN V masih belum memiliki strategi yang handal dan belum memuat unsur-unsur 5 M. Strategi yang dilakukan oleh pihak PTPN V hanya bertuju pada mempublish secara besar-besaran mengenai program PKBL yang sudah dilaksanakan di media massa. Hingga saat ini belum ada strategi yang begitu handal dalam mensukseskan program PKBL PTPN V.

Walaupun demikian, pihak PTPN V saat ini masih terus berbenah dalam melaksanakan program PKBL. Saat ini pihak PTPN V dalam menggencarkan PKBL, khususnya BL terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta menyesuaikan dengan misi pemerintahan

setempat, misalnya seperti musim penghijauan yang bekerja sama dengan pemerintah setempat maupun seperti sunat massal yang bekerja sama dengan BKKBN.

Program PKBL yang bersifat menunggu proposal yang masuk menjadi salah satu alasan mengapa pihak PTPN V belum memiliki strategi khusus dalam mengencarkan program PKBL. Dengan demikian, proposal yang masuk menjadi acuan apakah layak dibantu atau tidak. Dengan kata lain, pihak PTPN V sendiri tidak memiliki target-target khusus tiap tahunnya dalam melaksanakan program PKBL.

Rencana operasional adalah uraian terperinci dan sistematis mengenai rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan program, menyangkut alokasi waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan, dan hubungan antarkegiatan.

Berdasarkan hasil di lapangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan masih bersifat kondisional menyesuaikan dengan anggaran yang ditetapkan dan permintaan yang masuk. Untuk PK bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM yang sudah dimulai sejak tahun 2016. Sebelumnya proposal masuk ke unit-unit yang ada di kebun atau ke kantor pusat. Dinas koperasi dan UMKM menjadi pihak yang akan memberikan rekomendasi apakah UMKM tersebut layak dibantu atau tidak. Selain itu Dinas Koperasi memiliki data UMKM sehingga meminimalisir suatu UMKM tidak mendapat bantuan sebanyak dua kali.

Setiap tahun dipastikan selalu ada yang menerima PK dan BL. Seluruh dana PKBL berasal dari hasil RUPS yang sudah ditetapkan maksimal 2,5% dari laba bersih tahun sebelumnya, termasuk didalamnya biaya operasional. Dengan kata lain dana PKBL selalu berubah setiap tahun, tergantung laba. Untuk tahap pelaksanaannya Program Kemitraan biasanya diberikan pada per Hingga bulan Desember 2015 pihak PTPN V sudah menyerahkan bantuan PK di tujuh sektor baik itu industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, jasa dan peternakan dengan jumlah total Mitra binaan 263. Total nilai bantuan yang diberikan sebesar 5,6 Miliar. Sedangkan jumlah total Mitra Binaan sejak adanya PKBL tahun 1996 hingga tahun 2015 sebanyak 3983 dengan nilainya 85,6 Miliar.

Rencana evaluasi adalah rencana mengenai cara penilaian program yang dapat berupa: evaluasi proses, evaluasi hasil, dan evaluasi dampak program. Rencana rekomendasi adalah rencana mengenai saran atau reconsiderasi yang akan diajukan sesuai dengan rencana evaluasi untuk memperoleh bahan masukan bagi perbaikan maupun pengembangan program.

Evaluasi adalah telaah dari kebijakan, program dan kegiatan CSR yang berjalan berdasarkan konteks, relevansi, dampak dan outcomes, keberlanjutan, efektivitas dan efisiensi berdasarkan data dan informasi yang kredibel (Primahendra, 2015). Evaluasi akan memberikan masukan kepada pengambil kebijakan dan penanggungjawab tentang efektifitas kebijakan dan program, dampak dan pengaruh yang ditimbulkan secara langsung ataupun tidak, relevansi kegiatan dengan konteks, serta inisiatif dan adaptasi lapangan. Semuanya akan menjadi sarana perbaikan kebijakan, penguatan kelembagaan dan tata kelola, penetapan anggaran serta penilaian terhadap keberlanjutan program.

Berdasarkan data lapangan, pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN V, tahapan pengawasan dan evaluasi merupakan tahap terakhir. Pada tahapan evaluasi program pihak yang bertugas adalah pihak manajemen. Pihak manajemen tersebut terdiri dari Direksi dan

Kepala Bagian. Mereka mengevaluasi kinerja penyaluran program PKBL. Cara mengevaluasi adalah dengan menganalisis pelaksanaan program PKBL. Mereka juga membahas evaluasi penerima PKBL, evaluasi respon masyarakat penerima, evaluasi dampak program pada masyarakat penerima dan kendala-kendala yang dihadapi pada evaluasi tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan PKBL PTPN V, pada tahapan monitoring dan evaluasi juga tidak ada permasalahan dalam pelaksanaannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, PT Perkebunan Nusantara V yang berlokasi di Pekanbaru Riau, telah melakukan atau melaksanakan perencanaan program PKBL dengan cukup baik, walau pun masih ada tahapan-tahapan perencanaan program yang perlu dilengkapi atau disempurnakan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Namun PTPN V belum melaksanakan perencanaan komunikasi secara khusus karena hasil lapangan belum menunjukkan secara eksplisit adanya perencanaan terkait sumberdaya komunikasi, seperti perencanaan terhadap sumber, pesan, media dan khalayak serta efeknya.

Pada tahap identifikasi masalah, pihak PTPN V masih belum memiliki identifikasi yang cukup jelas karena masih bersifat menunggu proposal yang masuk dari Dinas Koperasi dan UMKM. Selain itu perencanaan PKBL belum diawali dengan melakukan pengumpulan data *base-line* dan *need assessment* untuk mengetahui kondisi terkini sebelum program dilaksanakan. Survei dilaksanakan setelah mendapatkan proposal yang telah lulus dari pihak Dinas Koperasi dan UMKM.

Pada tahapan tujuan komunikasi, pada umumnya tujuan dari program PKBL adalah sebagai berikut (1) Tercapainya pengelolaan dana PKBL secara tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran, (2) Tercapainya penyaluran dana PKBL kepada usaha kecil secara tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat pembinaan. (3) Tercapainya penggunaan dana PKBL kepada usahakecil secara tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat pembinaan serta (4) Berkembangnya usaha Mitra Binaan. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik apabila pihak PTPN V sudah melakukan pengumpulan data *base-line* dan *need assesment* sehingga memiliki tujuan-tujuan yang berbeda di setiap tahun sesuai dengan kondisi yang membutuhkan bantuan.

Pada tahapan penetapan rencana strategi pihak PTPN V hingga saat ini masih belum memiliki strategi khusus yang digunakan dalam mensukseskan program PKBL. Strategi yang dilakukan saat ini hanya terbatas pada mempublisch *release* tentang PKBL yang sudah diberikan kepada mitra binaan.

Pada tahapan rencana operasional, dana PKBL setiap tahunnya berasal dari laba bersih tahun sebelumnya maksimal 2,5%. Untuk tahap pemberian bantuan, Program Kemitraan biasanya dilakukan dari pertengahan tahun sedangkan Bina Lingkungan biasanya diberikan di akhir tahun.

Pada tahapan rencana evaluasi pihak yang bertugas adalah pihak manajemen. Pihak manajemen tersebut terdiri dari Direksi dan Kepala Bagian. Mereka mengevaluasi kinerja penyaluran program PKBL. Cara mengevaluasi adalah dengan menganalisis pelaksanaan program PKBL. Mereka juga membahas evaluasi penerima PKBL, evaluasi respon masyarakat penerima, evaluasi dampak program pada masyarakat penerima dan kendala-kendala yang dihadapi pada evaluasi tahun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Cangara, Hafid, 2005. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo

_____ 2014. *Perencanaan Dan Strategi Komunikasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo

Dwikartini. 2009 :30, *Corporate Social Responsibility-Transformasi Konsep Sustainability Managemen dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: Refika Utama

Kaye, Michael. 1994. *Comunication Management*. Sydney: Prentice Hall.

Miles, M.B., and A.M.Huberman. (1994). *Qualitative data analysis*. 2nd ed. Thoushand Oaks, CA: Sage.

Nursahid, 2006, *Tanggung Jawab Sosial BUMN*, Depok : Piramedia

Perkins, D. D, dan Marc A. Zimmerman. 1995. "*Empowerment theory, Psychology*. October 1995 Vol.23. New York.

Soedarsono, Dewi K, 2009, *Sistem Manajemen Komunikasi (teori, model dan aplikasinya)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media

Soemanto, B. et.al. 2007. *Sustainable Corporate : Implikasi Hubungan Harmonis Perusahaan dan Masyarakat*. PT Semen Gresik (Persero) : Gresik.

Solihin, I. 2009. *Corporate Social Responsibility From Charity to Sustainability*. Salemba Empat : Jakarta

Sumaryo. 2009. *Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat : Kasus di Provinsi Lampung*. Disertasi. IPB : Bogor

Sumodiningrat, G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.

Suparjan dan Hempri S. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*. CRS Indonesia : Yogyakarta.

Syahyuti. 2006. *30 Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*. PT. Bina Rena Pariwara : Jakarta Selatan

Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik : Fascho Publishing.